

Peni Hanggarini
Mishka Husen Balfas
Emil Radhiansyah
Hizra Marisa
Bagas Rizky Ramadhan
Alia Rahmatulummah
Rizki Damayanti
Ratih Ariefianti Soeroto
Suhayatmi

PENGANTAR STUDI HUBUNGAN BILATERAL TIONGKOK DENGAN NEGARA-NEGARA DI ASIA DAN PASIFIK

Editor:
Peni Hanggarini

**PENGANTAR STUDI
HUBUNGAN BILATERAL
TIONGKOK
DENGAN NEGARA-NEGARA
DI ASIA DAN PASIFIK**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
 2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
-

Peni Hanggarini | Mishka Husen Balfas | Emil Radhiansyah |
Hizra Marisa | Bagas Rizky Ramadhan | Alia Rahmatulummah |
Rizki Damayanti | Ratih Ariefianti Soeroto | Suhayatmi

PENGANTAR STUDI HUBUNGAN BILATERAL TIONGKOK DENGAN NEGARA-NEGARA DI ASIA DAN PASIFIK

Editor: Peni Hanggarini



PENGANTAR STUDI HUBUNGAN BILATERAL TIONGKOK DENGAN NEGARA-NEGARA DI ASIA DAN PASIFIK

ISBN

978-634-7311-08-5

Penulis

Peni Hanggarini | Mishka Husen Balfas | Emil Radhiansyah | Hizra Marisa |
Bagas Rizky Ramadhan | Alia Rahmatulummah | Rizki Damayanti |
Ratih Ariefianti Soeroto | Suhayatmi

Editor

Peni Hanggarini

Cover

Tim Penerbit Indonesia Emas Group

Tata Letak

Shofian Rahmat



PENERBIT

INDONESIA EMAS GROUP

Jalan Pasir Putih, No 16 Kota Bandung

Kontak 082-188-188-540

E-mail: penerbitieg@gmail.com

Cetakan Pertama, Juli 2025

i-x+226 hlm., 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All Rights Reserved

Daftar Isi

Kata Pengantar dari Rektor Universitas Paramadina.....	v
Kata Pengantar dari Editor.....	vii
Daftar Isi	ix

BAB 1

Pengaruh Tiongkok di Kawasan Asia dan Pasifik

<i>Peni Hanggarini</i>	1
------------------------------	---

BAB 2

Kerja Sama Ekonomi dan Politik Tiongkok dan Indonesia

<i>Mishka Husen Balfas</i>	17
----------------------------------	----

BAB 3

Diplomasi Olahraga: Jembatan Hubungan Bilateral Indonesia dan Tiongkok

<i>Emil Radhiansyah</i>	35
-------------------------------	----

BAB 4

Kerja Sama Tiongkok dan Indonesia Melalui Jalur Sutra Digital: Tantangan dalam Mengembangkan Konektivitas Digital di Indonesia

<i>Hizra Marisa</i>	69
---------------------------	----

BAB 5

Langkah Ekonomi Tiongkok di Malaysia: Antara Kepentingan Strategis dan Diplomasi Kawasan

<i>Bagas Rizky Ramadhan & Alia Rahmatulummah</i>	95
--	----

BAB 6

Kerja Sama Tiongkok dan Negara-Negara Muslim Asia Selatan: Antara Kepentingan Strategis dan Diplomasi Budaya

<i>Rizki Damayanti</i>	119
------------------------------	-----

BAB 7

Dampak Hubungan Bilateral Tiongkok dan Jepang Terhadap
Program MIC (*Made In China*) 2025

Ratih Ariefianti Soeroto..... 145

BAB 8

Kebijakan dan Diplomasi Tiongkok terhadap Timor-Leste dalam
Memperkuat Pengaruh di Asia Pasifik

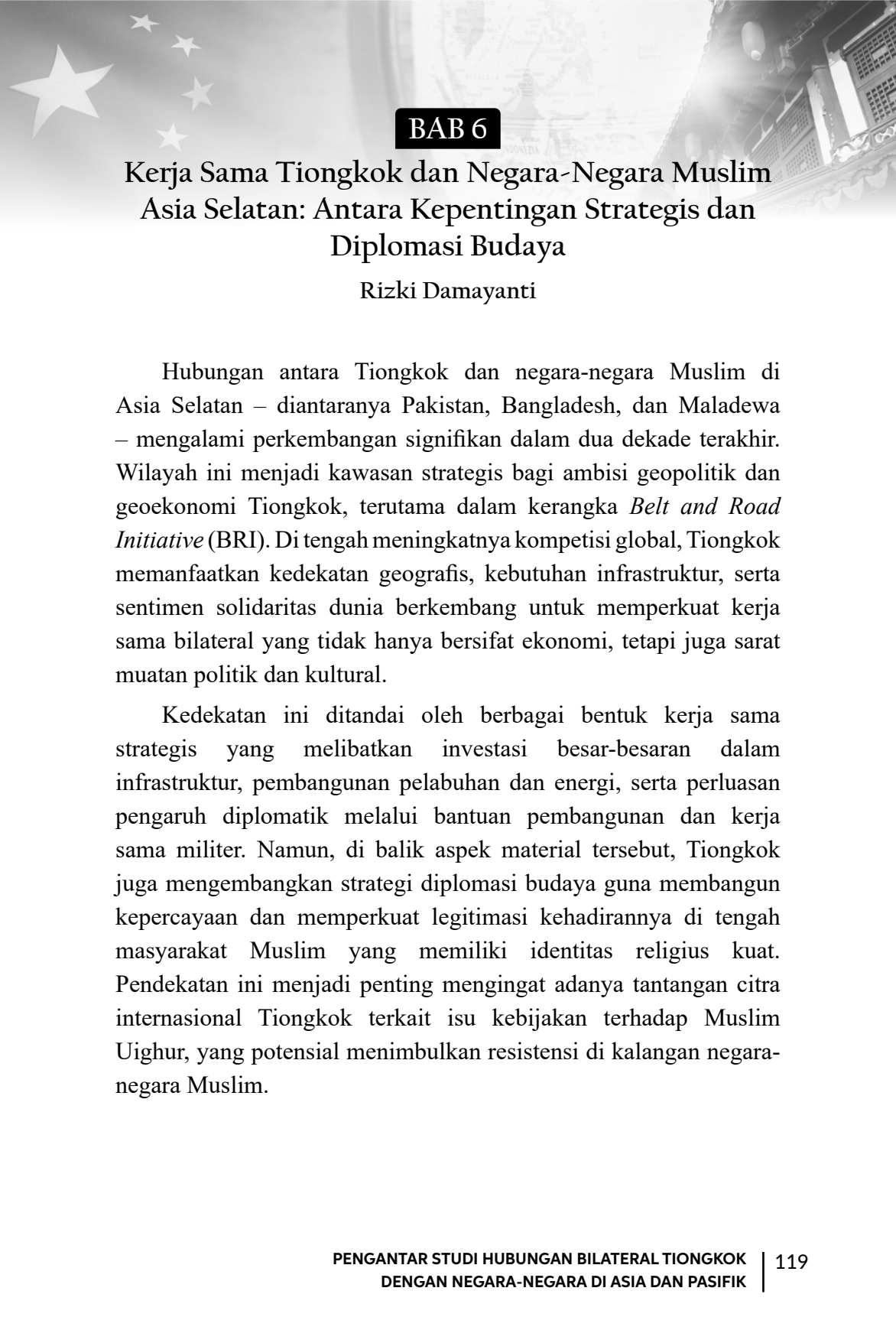
Suhatyati..... 165

BAB 9

Kompleksitas Hubungan Bilateral Tiongkok dengan Australia dan
Negara-negara di Kepulauan Pasifik

Peni Hanggarini..... 191

Biodata Penulis 219



BAB 6

Kerja Sama Tiongkok dan Negara-Negara Muslim Asia Selatan: Antara Kepentingan Strategis dan Diplomasi Budaya

Rizki Damayanti

Hubungan antara Tiongkok dan negara-negara Muslim di Asia Selatan – diantaranya Pakistan, Bangladesh, dan Maladewa – mengalami perkembangan signifikan dalam dua dekade terakhir. Wilayah ini menjadi kawasan strategis bagi ambisi geopolitik dan geoekonomi Tiongkok, terutama dalam kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI). Di tengah meningkatnya kompetisi global, Tiongkok memanfaatkan kedekatan geografis, kebutuhan infrastruktur, serta sentimen solidaritas dunia berkembang untuk memperkuat kerja sama bilateral yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sarat muatan politik dan kultural.

Kedekatan ini ditandai oleh berbagai bentuk kerja sama strategis yang melibatkan investasi besar-besaran dalam infrastruktur, pembangunan pelabuhan dan energi, serta perluasan pengaruh diplomatik melalui bantuan pembangunan dan kerja sama militer. Namun, di balik aspek material tersebut, Tiongkok juga mengembangkan strategi diplomasi budaya guna membangun kepercayaan dan memperkuat legitimasi kehadirannya di tengah masyarakat Muslim yang memiliki identitas religius kuat. Pendekatan ini menjadi penting mengingat adanya tantangan citra internasional Tiongkok terkait isu kebijakan terhadap Muslim Uighur, yang potensial menimbulkan resistensi di kalangan negara-negara Muslim.

Bab ini menganalisis secara kritis dinamika kerja sama Tiongkok dengan Pakistan, Bangladesh, dan Maladewa, dengan menekankan pada dua dimensi utama: kepentingan strategis dan diplomasi budaya. Dengan memahami kedua aspek ini secara holistik, maka dapat dikaji apakah kerja sama tersebut bersifat transaksional semata atau menyentuh aspek hubungan antarbudaya dan peradaban. Kajian ini bermanfaat dalam merumuskan pemahaman lebih luas tentang bagaimana kekuatan besar seperti Tiongkok menjalin hubungan dengan dunia Muslim, serta bagaimana negara-negara Muslim menanggapi tekanan dan peluang dari aktor global tersebut.

Bagian awal bab ini berupaya memberikan konteks awal dan tujuan penulisan. Bagian kedua merupakan pembahasan yang mengulas secara rinci latar belakang geopolitik dan hubungan ekonomi Tiongkok dengan ketiga negara Muslim tersebut, peran BRI dalam membentuk struktur kerja sama bilateral, serta strategi diplomasi budaya dan reaksi domestik terhadap kehadiran Tiongkok. Selain itu, bagian ini juga menyoroti dampak dari memanasnya kembali perang dagang antara AS dan Tiongkok di era ‘Trump 2.0’, yang turut memengaruhi pilihan kebijakan luar negeri dan arah pembangunan ekonomi ketiga negara Muslim tersebut. Bagian terakhir merupakan bagian penutup yang merangkum temuan utama dan memberikan refleksi kritis terhadap masa depan hubungan Tiongkok dengan negara-negara Muslim di Asia Selatan dalam konteks dinamika internasional yang terus berubah.

Latar Belakang Geopolitik dan Geoekonomi Asia Selatan dalam Strategi Global Tiongkok

Asia Selatan memegang posisi strategis dalam tatanan geopolitik global karena posisi geografisnya yang berada di persimpangan antara Asia Tengah, Timur Tengah, dan Samudra Hindia. Kawasan ini menjadi jalur penting bagi perdagangan maritim global dan

memiliki sumber daya manusia serta alam yang besar. Tiongkok, sebagai kekuatan global yang tengah mengukuhkan pengaruhnya, menempatkan Asia Selatan sebagai kawasan kunci dalam proyek ambisiusnya, BRI, yang diluncurkan pada tahun 2013 (Rolland, 2017). Posisi strategis ini menjadikan Asia Selatan tidak hanya sebagai kawasan transit, tetapi juga sebagai simpul penting dalam upaya Tiongkok membangun konektivitas regional dan global melalui jalur darat dan maritim BRI, sebagaimana tergambar dalam peta berikut.



Gambar 6.1.

Peta Geostrategis BRI: Jalur Darat dan Maritim BRI di Asia Selatan

Sumber: <https://www.csis.org/analysis/chinas-belt-and-roller-coaster>

Peta jalur BRI serta kontur geografis kawasan Asia dan Samudra Hindia tersebut menunjukkan gambaran kuat akan adanya strategi ekspansi geoekonomi Tiongkok di kawasan Asia Selatan. Melalui peta ini, terlihat jelas konektivitas antara jalur darat seperti

China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) dan jalur maritim yang membentang dari pelabuhan-pelabuhan utama di Tiongkok menuju Samudra Hindia, melewati titik-titik strategis seperti Gwadar di Pakistan dan rute laut dekat Maladewa. Jalur ini mempertegas bagaimana Tiongkok tidak hanya mengandalkan proyek darat untuk memperkuat pengaruhnya, tetapi juga menggunakan jalur maritim untuk mengintegrasikan negara-negara Muslim Asia Selatan ke dalam orbit pengaruh ekonominya. Dalam konteks rivalitas Tiongkok-Amerika Serikat (AS) dan ketegangan global pasca Trump 2.0, peta ini membantu menjelaskan urgensi strategis wilayah Asia Selatan bagi Tiongkok sebagai bagian dari upaya diversifikasi jalur perdagangan dan mitigasi risiko dari blokade geopolitik atau ketergantungan terhadap Selat Malaka.

Keterhubungan jalur-jalur strategis yang tergambar dalam peta tersebut menjadi fondasi bagi pemahaman lebih lanjut mengenai kepentingan geopolitik dan geoekonomi Tiongkok dalam membangun infrastruktur dan aliansi strategis di Asia Selatan. Dalam konteks ini, Tiongkok memiliki kepentingan strategis untuk mengamankan jalur suplai energi dan memperluas pengaruh ekonominya melalui pembangunan infrastruktur, pelabuhan, dan jalur kereta api lintas negara. Negara-negara seperti Pakistan, Bangladesh, dan Maladewa bukan hanya sekutu potensial secara ekonomi, tetapi juga merupakan mitra penting dalam memperkuat akses Tiongkok ke Samudra Hindia dan kawasan sekitarnya. Kepentingan ini semakin diperkuat oleh keinginan Tiongkok untuk menyeimbangkan pengaruh AS dan India di kawasan tersebut (Small, 2015).

Secara khusus, Pakistan menempati posisi utama dalam strategi BRI melalui CPEC, yang menghubungkan wilayah Xinjiang di Tiongkok barat dengan pelabuhan Gwadar di Laut Arab. Proyek ini mencerminkan ambisi Tiongkok untuk mendapatkan jalur alternatif terhadap Selat Malaka yang rawan konflik. Selain itu, CPEC juga

memainkan peran penting dalam menstabilkan kawasan barat Tiongkok yang sensitif secara etnis dan religius (Chaziza, 2021).

Bangladesh, dengan pelabuhan strategis di Teluk Benggala dan populasi Muslim yang besar, menjadi lokasi penting untuk ekspansi ekonomi Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah menjadi mitra dagang dan investor utama di Bangladesh, khususnya dalam proyek infrastruktur seperti jalan tol, pembangkit listrik, dan jaringan kereta api. Hal ini menunjukkan upaya Tiongkok untuk memperkuat konektivitas regional sambil meningkatkan ketergantungan ekonomi mitra-mitranya (Ahamed, Hossain, & Rahaman, 2021). Sementara itu, Maladewa, meski kecil secara geografis dan populasi, memiliki nilai strategis yang besar karena lokasinya yang mengapit jalur pelayaran internasional di Samudra Hindia. Lokasinya yang berada di tengah-tengah jalur pelayaran antara Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara menjadikan Maladewa penting dalam konteks geopolitik dan keamanan maritim, serta menarik perhatian negara-negara besar yang berkepentingan di kawasan Indo-Pasifik (Kutty, 2019).

Pendekatan Tiongkok di Asia Selatan mencerminkan sinergi antara diplomasi ekonomi dan kepentingan politik. Melalui penyediaan pinjaman lunak dan bantuan teknis, Tiongkok berhasil membangun citra sebagai mitra pembangunan alternatif bagi negara-negara yang kurang puas dengan lembaga-lembaga keuangan Barat. Namun, keterlibatan ekonomi ini tidak lepas dari dimensi keamanan dan militer yang tersembunyi di balik proyek-proyek sipil (Swaine, 2015).

Kawasan Asia Selatan juga menjadi ladang uji coba bagi strategi Tiongkok dalam menghadapi resistensi terhadap hegemoninya. Ketergantungan ekonomi negara-negara seperti Pakistan dan Maladewa terhadap dana dan infrastruktur dari Tiongkok sering kali menimbulkan perdebatan domestik tentang kedaulatan ekonomi dan

kontrol asing atas aset nasional. Hal ini menjadikan kawasan Asia Selatan sebagai medan penting dalam menilai efektivitas dan dampak jangka panjang strategi Tiongkok. Selain itu, pendekatan Tiongkok terhadap kawasan ini memiliki implikasi terhadap hubungan antar kekuatan besar. Persaingan antara Tiongkok dan India di kawasan Asia Selatan menjadi semakin nyata, terutama di wilayah seperti perbatasan Himalaya dan Samudra Hindia. Tiongkok memanfaatkan kerja sama dengan negara-negara tetangga India untuk mengimbangi pengaruh New Delhi dan memperkuat posisi strategisnya di Asia (Pant & Passi, 2017).

Geoekonomi Tiongkok juga memperlihatkan pola integrasi regional yang asimetris, di mana negara-negara kecil terlibat dalam struktur kerja sama yang berat sebelah. Meskipun proyek-proyek BRI menawarkan manfaat jangka pendek seperti pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, banyak negara menghadapi risiko keterikatan utang dan hilangnya kontrol atas aset strategis. Hal ini menciptakan ketegangan antara kebutuhan pembangunan dan kedaulatan nasional (Jones & Hameiri, 2020). Dalam konteks ini, investasi Tiongkok di sektor pariwisata, pelabuhan, dan pembangunan urban telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengamat internasional mengenai potensi adanya “*debt-trap diplomacy*” atau diplomasi jebakan utang (Hurley, Morris, & Portelance, 2018).

Dengan latar belakang ini, jelas bahwa kerja sama Tiongkok dengan negara-negara Muslim di Asia Selatan tidak semata didorong oleh motif ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari strategi besar dalam membentuk tatanan regional yang berpihak pada kepentingan Tiongkok. Oleh karena itu, analisis terhadap latar belakang geopolitik dan geoekonomi kawasan ini penting untuk memahami dinamika kerja sama yang lebih luas, termasuk aspek diplomasi budaya dan peran agama dalam memperkuat relasi bilateral.

Belt and Road Initiative dan Kepentingan Strategis Tiongkok di Pakistan, Bangladesh, dan Maladewa

Pakistan merupakan mitra paling menonjol dalam BRI melalui proyek unggulan CPEC. Dengan nilai investasi sekitar USD 62 miliar, CPEC mencakup proyek-proyek besar seperti pembangunan pelabuhan Gwadar, jaringan jalan tol, pembangkit listrik, dan jalur pipa energi. CPEC tidak hanya berfungsi sebagai koridor ekonomi tetapi juga sebagai perpanjangan tangan Tiongkok ke Samudra Hindia, memberikan Beijing jalur langsung ke perairan tanpa harus melalui Selat Malaka yang strategis namun rawan konflik. Dari sisi keamanan, CPEC juga memiliki dimensi strategis karena beroperasi di wilayah sensitif seperti Balochistan dan Xinjiang. Tiongkok memanfaatkan proyek ini untuk menstabilkan wilayah baratnya yang dihuni oleh minoritas Uighur dan untuk meningkatkan kontrol terhadap arus barang dan orang di perbatasan barat daya. Selain itu, kerja sama militer dan keamanan antara Tiongkok dan Pakistan meningkat seiring dengan proyek-proyek BRI, termasuk pembangunan pangkalan logistik dan pelatihan militer bersama (Small, 2015).

Sementara itu, Bangladesh menjadi titik penting bagi strategi maritim Tiongkok. Pelabuhan Payra dan proyek pelabuhan Sonadia sempat menjadi pusat perhatian dalam kerja sama bilateral, meskipun proyek Sonadia akhirnya dibatalkan karena tekanan geopolitik. Meski demikian, Tiongkok tetap menjadi mitra pembangunan utama Bangladesh melalui pembiayaan proyek jalan tol, jalur kereta api, dan kawasan industri. Nilai investasi Tiongkok di Bangladesh mencapai miliaran dolar dan menjadikannya kreditur besar kedua setelah Bank Dunia. Bangladesh juga menjadi pasar penting bagi ekspor teknologi dan infrastruktur Tiongkok. Melalui skema bantuan dan pinjaman lunak, Tiongkok memperluas pengaruh ekonominya di sektor energi, transportasi, dan teknologi informasi. Di sisi

lain, pemerintah Bangladesh melihat BRI sebagai peluang untuk mempercepat industrialisasi dan pembangunan infrastruktur yang sebelumnya tertunda karena keterbatasan dana domestik (Jasmin, Sakib, & Shishir, 2023).

Maladewa, meskipun kecil secara ukuran dan populasi, memiliki nilai strategis tinggi karena letaknya di jalur pelayaran internasional yang padat. Letak geografisnya yang tersebar di tengah Samudra Hindia memberikan keunggulan dalam mengawasi dan mengakses rute perdagangan vital yang menghubungkan Asia Timur, Timur Tengah, dan Afrika. Dalam konteks ini, keterlibatan Tiongkok dalam proyek infrastruktur seperti jalan lintas laut, perluasan bandara, dan pembangunan perumahan di Male bukan hanya mencerminkan dukungan ekonomi, tetapi juga strategi jangka panjang untuk menempatkan pijakan logistik dan diplomatik di kawasan yang secara historis lebih dekat dengan pengaruh India dan mitra Barat. Hubungan ekonomi ini kemudian berujung pada lonjakan utang luar negeri Maladewa kepada Tiongkok, yang mendorong kekhawatiran akan praktik “*debt-trap diplomacy*” seperti yang dituduhkan di negara-negara lain di bawah BRI (Hurley, Morris, & Portelance, 2018).

Ketiga negara – Pakistan, Bangladesh, dan Maladewa – menunjukkan pola keterikatan ekonomi yang cukup dalam dengan Tiongkok. Namun, masing-masing juga menghadapi dilema antara manfaat ekonomi jangka pendek dan implikasi politik serta kedaulatan jangka panjang. Dalam banyak kasus, proyek BRI menimbulkan kritik domestik karena dugaan kurangnya transparansi, ketimpangan dalam kerja sama, dan meningkatnya ketergantungan pada Tiongkok (Jones & Hameiri, 2020).

Dari perspektif Tiongkok, kerja sama dengan negara-negara ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga bagian dari strategi menghadapi pengaruh India dan AS di Asia Selatan. BRI berperan

sebagai alat *soft power* yang dibungkus dalam narasi *win-win cooperation*. Namun pada praktiknya, Tiongkok juga memperoleh keuntungan strategis seperti akses ke pelabuhan, sumber daya alam, dan pengaruh diplomatik yang meningkat di forum internasional. Dalam konteks global yang semakin multipolar, BRI di Asia Selatan memperlihatkan bagaimana Tiongkok menggunakan instrumen ekonomi untuk membangun pengaruh politik dan strategis. Dengan menggabungkan pendekatan pragmatis dan ekspansionis, Tiongkok berusaha menciptakan “lingkungan eksternal yang stabil” untuk kepentingan domestiknya sekaligus memperluas pengaruhnya sebagai kekuatan global alternatif bagi hegemoni Barat.

Diplomasi Budaya Tiongkok:

Antara *Soft Power* dan Simbolisme Keagamaan

Diplomasi budaya telah menjadi salah satu instrumen utama dalam strategi *soft power* Tiongkok untuk memperkuat pengaruh globalnya, terutama di wilayah-wilayah dengan signifikansi strategis seperti Asia Selatan. Seiring dengan ekspansi BRI, pemerintah Tiongkok mulai mengintensifkan penggunaan budaya sebagai sarana untuk membangun citra positif dan menumbuhkan kedekatan emosional dengan negara-negara mitra. Dalam konteks ini, budaya tidak sekedar menjadi produk ekspor, melainkan juga alat untuk membentuk persepsi dan memperhalus agenda politik dan ekonomi Tiongkok di luar negeri (Nye, 2004; d’Hooghe, 2015).

Di negara-negara Muslim Asia Selatan seperti Pakistan, Bangladesh, dan Maladewa, diplomasi budaya Tiongkok mengambil pendekatan yang cukup khas. Selain mempromosikan seni dan bahasa Tiongkok melalui lembaga seperti *Confucius Institute*, Tiongkok juga mulai menyentuh aspek keagamaan dan simbolisme budaya lokal. Hal ini dilakukan dengan sangat hati-hati, mengingat

sensitivitas agama di kawasan tersebut. Pemerintah Tiongkok, misalnya, mengundang ulama dan tokoh Muslim dari Pakistan dan Bangladesh untuk mengunjungi Xinjiang guna menunjukkan narasi resmi tentang stabilitas dan toleransi beragama di wilayah yang selama ini mendapat sorotan internasional (Chaziza, 2021). Strategi ini merupakan bagian dari upaya kontra-narasi terhadap kritik atas kebijakan Tiongkok terhadap Muslim Uighur. Dengan memperkuat hubungan dengan negara-negara Muslim melalui simbolisme keagamaan, Beijing berharap dapat menetralsir kecaman dari dunia Islam. Sebagai contoh, kunjungan para ulama Pakistan ke masjid-masjid di Xinjiang diorganisir untuk menegaskan bahwa Islam tidak ditekan, melainkan diatur secara terstruktur dalam kerangka “sinifikasi agama (*sinicization of religion*)” yang dicanangkan oleh pemerintah Tiongkok (Miao, 2020).

Dalam praktiknya, diplomasi budaya ini juga melibatkan penyelenggaraan festival kebudayaan, pertukaran pelajar, pelatihan guru, dan pameran seni. Program-program ini sebagian besar dibiayai oleh pemerintah Tiongkok atau institusi terkait seperti Hanban. Di Bangladesh, misalnya, pertunjukan budaya Tiongkok secara rutin diadakan di Dhaka dan universitas-universitas besar untuk mempromosikan pemahaman budaya Tiongkok. Selain itu, Beijing menyediakan beasiswa besar-besaran bagi mahasiswa dari negara-negara ini untuk belajar ke Tiongkok, menciptakan jaringan alumni yang nantinya bisa menjadi mitra kebijakan luar negeri Tiongkok (Sharma, 2019).

Diplomasi budaya Tiongkok juga menyentuh dimensi historis dan simbolik. Tiongkok sering merujuk kepada jejak Islam di masa Dinasti Tang dan hubungan perdagangan kuno dengan dunia Muslim untuk membangun narasi “persahabatan bersejarah.” Di beberapa kesempatan, Beijing menyampaikan bahwa Islam bukanlah agama asing di Tiongkok, melainkan telah menjadi bagian dari masyarakat

Tiongkok selama berabad-abad. Narasi ini digunakan untuk membangun legitimasi di mata mitra Muslim dan mengurangi tekanan terhadap isu-isu domestik terkait Muslim Uighur (Shi & Kakar, 2024).

Namun, upaya ini tidak selalu mendapat tanggapan positif. Kritik tetap bermunculan, terutama dari masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi hak asasi manusia (HAM) di negara-negara Muslim yang tidak sepenuhnya menerima narasi resmi Beijing. Di Pakistan, misalnya, kalangan tertentu mempertanyakan sikap pemerintah yang terlalu akomodatif terhadap Tiongkok meskipun ada pelanggaran hak asasi terhadap sesama Muslim. Dilema ini memperlihatkan batas dari diplomasi budaya Tiongkok ketika berhadapan dengan nilai-nilai keagamaan dan solidaritas transnasional umat Islam (Zhang, 2023).

Dalam konteks *soft power*, keberhasilan diplomasi budaya Tiongkok bergantung pada persepsi lokal dan kemampuan membangun narasi yang selaras dengan nilai-nilai masyarakat target. Di negara-negara seperti Bangladesh dan Maladewa, di mana budaya Islam bercampur dengan nasionalisme dan tradisi lokal, pendekatan yang terlalu normatif atau manipulatif berpotensi menimbulkan resistensi. Oleh karena itu, Tiongkok berupaya menyeimbangkan antara promosi budaya dan penghormatan terhadap identitas lokal (Kurlantzick, 2015). Selain faktor budaya, media juga memainkan peran penting dalam strategi ini. Media berbahasa lokal yang didukung oleh Tiongkok sering kali menyebarkan narasi positif mengenai proyek BRI dan hubungan bilateral. Artikel-artikel yang menekankan solidaritas antaretnis dan kerukunan antaragama di Tiongkok juga dimuat di media-media negara mitra. Strategi ini menunjukkan upaya Beijing dalam mengendalikan narasi lintas negara melalui diplomasi informasi dan propaganda halus (Shi & Kakar, 2024).

Dalam jangka panjang, diplomasi budaya Tiongkok dipandang akan menghadapi tantangan yang lebih besar seiring meningkatnya kesadaran publik di negara-negara Muslim mengenai isu-isu HAM dan kebebasan beragama. Strategi *soft power* Tiongkok akan efektif hanya jika mampu menggabungkan ketulusan dengan kepekaan terhadap nilai dan norma lokal. Sebaliknya, pendekatan yang terlalu pragmatis bisa menjadi bumerang yang justru menimbulkan sentimen anti-Tiongkok di kalangan masyarakat bawah.

Dengan demikian, pendekatan diplomasi budaya Tiongkok yang menggabungkan *soft power* dan simbolisme keagamaan memperlihatkan bahwa Beijing tidak hanya berambisi secara ekonomi, tetapi juga ingin mengelola persepsi globalnya dengan cermat. Strategi ini relevan dalam konteks Asia Selatan yang penuh kompleksitas sosial dan keagamaan. Namun, efektivitas jangka panjangnya masih akan diuji oleh dinamika politik domestik di negara-negara mitra serta konsistensi Tiongkok dalam menerapkan prinsip-prinsip kerja sama yang setara dan saling menghormati.

Reaksi Negara-Negara Muslim Asia Selatan terhadap Pengaruh Tiongkok dalam Aspek Politik dan Sosial

Pengaruh Tiongkok terutama melalui inisiatif BRI dan diplomasi budaya ditanggapi berbeda-beda oleh negara-negara muslim Asia Selatan. Hal ini menunjukkan adanya kompleksitas dinamika domestik dan hubungan bilateral masing-masing negara dengan Tiongkok. Pakistan, Bangladesh, dan Maladewa menjadi tiga negara yang paling menonjol dalam menerima pengaruh Tiongkok, tetapi cara mereka metanggapi tidak selalu sejalan secara ideologis maupun institusional.

Secara politik, pemerintah Pakistan menunjukkan dukungan yang sangat kuat terhadap Tiongkok. Kemitraan strategis antara Islamabad dan Beijing kerap disebut sebagai “*all-weather*

friendship.” Pemerintah Pakistan menahan diri untuk tidak mengkritik pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur di Xinjiang dan bahkan memuji pendekatan Tiongkok dalam menangani isu-isu ekstremisme. Dukungan ini sebagian besar dilatarbelakangi oleh ketergantungan ekonomi dan militer Pakistan terhadap Tiongkok. Namun, secara sosial, sikap publik di Pakistan tidak sepenuhnya sejalan dengan kebijakan pemerintah. Sejumlah kelompok Islam dan aktivis HAM menentang diamnya pemerintah terhadap penindasan Muslim di Xinjiang. Beberapa protes kecil dan kampanye daring sempat muncul, meski tidak berkembang menjadi gerakan besar karena terbatasnya ruang sipil dan dominasi narasi pro-Tiongkok dalam media arus utama (Kelemen & Turcsányi, 2019).

Di Bangladesh, pemerintah relatif berhati-hati dalam menanggapi pengaruh Tiongkok. Meskipun proyek infrastruktur BRI diterima dan hubungan dagang meningkat, Dhaka tetap menjaga keseimbangan dengan India dan negara-negara Barat. Dalam isu Uighur, pemerintah Bangladesh menghindari konfrontasi langsung dan cenderung mengedepankan diplomasi senyap. Namun demikian, ada tekanan dari masyarakat sipil dan kelompok Islam yang lebih vokal menyuarakan keprihatinan mereka terhadap pelanggaran kebebasan beragama di Tiongkok. Secara sosial, masyarakat Bangladesh menunjukkan tingkat kesadaran yang cukup tinggi terhadap isu global umat Islam, termasuk krisis Uighur. Aksi solidaritas dan diskusi publik mengenai hal ini kerap muncul di media sosial dan kampus-kampus. Di sisi lain, sebagian elit politik dan bisnis mendukung kerja sama ekonomi dengan Tiongkok karena menawarkan pembiayaan yang cepat dan tanpa banyak syarat ideologis (Ahamed et al., 2021).

Reaksi dari Maladewa sedikit berbeda karena negara ini memiliki skala politik yang lebih kecil dan sangat bergantung pada mitra luar negeri dalam bidang pariwisata dan pembangunan. Pemerintah

Maladewa dalam beberapa tahun terakhir mencoba mengimbangi pengaruh India dan Tiongkok. Dalam konteks hubungan dengan Tiongkok, pemerintah cenderung pragmatis dan enggan terlibat dalam isu-isu sensitif seperti perlakuan terhadap Muslim Uighur (Kutty, 2019). Meski demikian, sentimen publik di Maladewa relatif lebih netral terhadap Tiongkok dibandingkan Pakistan dan Bangladesh. Hal ini disebabkan oleh minimnya akses informasi independen serta fokus masyarakat pada isu-isu domestik. Isu Uighur jarang menjadi perbincangan publik, meskipun komunitas Muslim di Maladewa sangat erat dengan identitas keagamaan mereka (Sultana, 2024).

Salah satu dinamika menarik adalah bagaimana elite agama di ketiga negara menanggapi pendekatan Tiongkok melalui kunjungan Xinjiang atau pelibatan dalam forum keagamaan. Sebagian menerima undangan ini dan menyampaikan testimoni positif tentang toleransi beragama di Tiongkok, sementara yang lain menolak untuk ikut serta atau mengkritik pendekatan tersebut sebagai bentuk manipulasi politik (Chaziza, 2021). Fenomena ini menunjukkan adanya fragmentasi reaksi sosial yang tidak selalu bisa disamakan hanya berdasarkan kesamaan agama. Kepentingan politik, akses terhadap informasi, dan afiliasi ideologis memengaruhi cara komunitas Muslim menanggapi narasi budaya dan agama yang dibangun oleh Tiongkok. Hal ini mencerminkan bahwa solidaritas keagamaan tidak otomatis mengarah pada solidaritas politik.

Pemerintah Tiongkok mencoba mengatasi resistensi sosial ini melalui pendekatan media dan institusi pendidikan, termasuk pendirian *Confucius Institute* serta pemberian beasiswa. Namun, efektivitas strategi ini dipertanyakan ketika narasi yang dibawa tidak sejalan dengan nilai-nilai keagamaan lokal atau bertabrakan dengan kesadaran global terhadap isu HAM. Dalam beberapa kasus, tekanan terhadap pemerintah untuk mengambil sikap lebih keras terhadap Tiongkok datang pula dari diaspora Muslim Pakistan, Bangladesh,

dan Maladewa yang berada di negara-negara Barat. Diaspora ini memainkan peran penting dalam memobilisasi opini internasional dan menekan negara asal mereka agar tidak bersikap permisif terhadap kebijakan luar negeri Tiongkok. Secara umum, tanggapan politik dan sosial dari negara-negara Muslim Asia Selatan terhadap Tiongkok adalah cerminan dari pertemuan antara kalkulasi strategis dan realitas sosial-keagamaan. Tanggapan ini terus bertransformasi seiring dengan perubahan geopolitik global, tekanan domestik, dan upaya Tiongkok dalam memperhalus pendekatannya terhadap dunia Muslim.

Tantangan dan Peluang: Isu Uighur, Ketergantungan Ekonomi, dan Resistensi Domestik

Hubungan antara Tiongkok dan negara-negara Muslim di Asia Selatan tidak hanya dibangun atas dasar pragmatisme ekonomi, tetapi juga diuji oleh isu-isu sensitif seperti pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. Ketika kerja sama ekonomi melalui BRI menguat, tekanan sosial dan moral atas isu Uighur menimbulkan tantangan tersendiri. Negara-negara seperti Pakistan, Bangladesh, dan Maladewa berada dalam posisi untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan solidaritas keagamaan dan tekanan domestik.

Isu Uighur menjadi penghambat diplomasi budaya dan *soft power* Tiongkok, terutama di kalangan masyarakat Muslim. Meskipun pemerintah di ketiga negara tersebut cenderung menghindari kritik terbuka terhadap Beijing, masyarakat sipil, aktivis hak asasi manusia, dan sebagian kelompok keagamaan telah mulai mempertanyakan narasi resmi yang menyangkal adanya pelanggaran terhadap Muslim di Xinjiang. Hal ini mencerminkan adanya ketegangan antara elite politik yang pragmatis dan basis sosial yang lebih ideologis.

Ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah di Asia Selatan untuk menjaga hubungan yang harmonis. Dalam konteks Pakistan, proyek-proyek dalam koridor ekonomi China-Pakistan (CPEC) telah menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur dan energi (Wolf, 2019).

Sementara itu, Bangladesh dan Maladewa juga menerima investasi besar dari Tiongkok dalam bidang pelabuhan, jalan raya, dan teknologi. Ketergantungan ini menciptakan dilema antara kedaulatan politik dan keinginan menjaga stabilitas ekonomi. Tiongkok memanfaatkan ketergantungan ekonomi ini sebagai *leverage* politik untuk meredam kritik terhadap isu Uighur. Dalam berbagai forum internasional, Pakistan dan Bangladesh diketahui mendukung pernyataan bersama yang membela tindakan Tiongkok di Xinjiang, atau memilih abstain dari kritik terhadap Beijing. Sikap ini tidak hanya mengundang kritik dari kelompok HAM global, tetapi juga menimbulkan resistensi dalam negeri yang menyangkan lemahnya komitmen terhadap solidaritas umat Islam. Namun, resistensi domestik terhadap kerja sama dengan Tiongkok tidak bersifat seragam. Di Pakistan, kelompok-kelompok Islam seperti Jamaat-e-Islami dan sebagian masyarakat urban menunjukkan kekhawatiran terhadap dominasi Tiongkok, terutama karena kurangnya transparansi proyek dan dugaan eksploitasi tenaga kerja lokal (Shah, Hussain & Rasheed, 2020). Di Bangladesh, diskursus keagamaan mulai mengangkat isu Uighur, meskipun tidak mendapatkan dukungan luas dari partai politik utama. Di Maladewa, resistensi muncul dalam bentuk kekhawatiran akan hilangnya kedaulatan fiskal akibat utang luar negeri dari proyek-proyek Tiongkok (Kutty, 2019).

Di sisi lain, peluang tetap terbuka bagi Tiongkok untuk memperhalus pendekatannya melalui diplomasi budaya dan ekonomi inklusif. Program pertukaran pelajar, bantuan beasiswa,

serta pelibatan tokoh agama lokal dalam kunjungan ke Xinjiang telah menjadi bagian dari strategi memperkuat legitimasi di mata umat Muslim. Namun, keefektifan pendekatan ini dipertanyakan ketika bukti-bukti represif di Xinjiang terus bermunculan dalam laporan lembaga internasional dan media independen.

Selain itu, kerja sama ekonomi yang intensif juga membuka peluang transformasi sosial dan teknologi di negara-negara mitra. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas regional dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan transparan dan inklusif. Dalam jangka panjang, negara-negara Asia Selatan dapat memanfaatkan ketergantungan terhadap Tiongkok untuk menegosiasikan peran yang lebih seimbang dan otonom dalam kerja sama bilateral (Callahan, 2016). Namun demikian, keberhasilan strategi ini tergantung pada kemampuan elite lokal dalam menanggapi tekanan publik dan mengelola diplomasi dengan Tiongkok secara cermat. Pemerintah di kawasan ini harus mampu menjembatani kepentingan geopolitik dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, termasuk aspirasi keagamaan, hak asasi manusia, dan transparansi politik. Jika tidak, akan muncul ketidakpuasan yang dapat dimobilisasi oleh kelompok oposisi dan memperburuk stabilitas domestik.

Tantangan lain adalah persepsi publik terhadap intensi Tiongkok. Banyak kalangan melihat proyek-proyek Tiongkok sebagai bentuk neo-kolonialisme baru yang menjerat negara-negara berkembang melalui *debt trap diplomacy*. Kekhawatiran ini muncul karena pengalaman Sri Lanka yang harus menyerahkan pelabuhan Hambantota kepada Tiongkok dalam jangka waktu panjang akibat gagal membayar utang (Hurley et al., 2018). Meski belum terjadi di Pakistan atau Bangladesh, narasi ini cukup kuat untuk menciptakan resistensi sosial yang berkepanjangan.

Di tengah tantangan tersebut, terbuka pula kemungkinan untuk menciptakan tata hubungan baru antara negara-negara Muslim Asia Selatan dan Tiongkok yang lebih berorientasi pada *mutual respect* dan akuntabilitas. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga nilai-nilai keislaman dan hak asasi manusia dapat menjadi kekuatan moral untuk menegosiasi relasi ekonomi dan budaya yang lebih adil. Tanggapan yang muncul di tingkat domestik terhadap kerja sama dengan Tiongkok menjadi cermin dari dinamika demokrasi, kekuatan masyarakat sipil, serta keterbukaan informasi di masing-masing negara. Semakin kuat masyarakat sipil, semakin besar pula peluang untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan nilai-nilai sosial dan religius yang hidup di tengah masyarakat.

Rivalitas AS-Tiongkok dan Dampaknya terhadap Negara-Negara Muslim Asia Selatan: Memaknai “Perang Dagang Trump 2.0”

Rivalitas strategis antara AS dan Tiongkok mengalami eskalasi baru pasca pemilu presiden AS 2024 yang mengantarkan kembali Donald Trump ke Gedung Putih. Dengan semangat proteksionisme ekonomi dan pendekatan konfrontatif yang disebut sebagai “*Trump Trade War 2.0*,” hubungan bilateral AS-Tiongkok kembali ke jalur penuh ketegangan. Tarif ekspor yang diperluas, pembatasan akses terhadap teknologi semikonduktor, dan pelarangan perusahaan-perusahaan Tiongkok di pasar keuangan AS menandai awal dari babak baru rivalitas dua kekuatan global ini (Singh, 2024).

Perkembangan ini berdampak luas tidak hanya pada ekonomi global, tetapi juga pada kawasan strategis seperti Asia Selatan, di mana Tiongkok terus mengonsolidasikan pengaruhnya, terutama di negara-negara Muslim seperti Pakistan, Bangladesh, dan Maladewa. Dengan AS yang makin berfokus pada isu-isu domestik dan proteksi

industri, terjadi kekosongan relatif yang dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk memperluas jangkauan ekonominya melalui proyek-proyek infrastruktur, diplomasi budaya, dan investasi bilateral.

Pakistan, sebagai sekutu dekat Tiongkok dalam kerangka CPEC, melihat rivalitas AS-Tiongkok sebagai peluang untuk memperkuat posisi tawarnya. Meskipun hubungan Pakistan dengan AS mengalami dinamika, seperti penangguhan bantuan militer pada 2018, pemerintah Pakistan semakin mendekat ke Beijing demi menjamin stabilitas pembangunan infrastruktur dan kebutuhan energi. Ketika AS di bawah Trump 2.0 kembali bersikap agresif terhadap Tiongkok, Islamabad tetap konsisten menjaga hubungan dengan Beijing, menunjukkan bahwa stabilitas dukungan ekonomi lebih diprioritaskan dibanding aliansi politik ideologis.

Bangladesh menunjukkan strategi keseimbangan yang hati-hati dalam menavigasi perubahan geopolitik ini. Ketika AS menyoroti pelanggaran HAM dan menekan isu-isu demokrasi dalam konteks pemilu Bangladesh, Tiongkok justru menawarkan kerja sama ekonomi yang lebih pragmatis. Dalam konteks perang dagang baru AS-Tiongkok, Bangladesh mendapat peluang untuk menggantikan posisi Tiongkok dalam rantai pasok global, namun ketergantungan pada investasi dan teknologi dari Tiongkok membuat Dhaka tetap menjaga hubungan dekat dengan Beijing (Qadri, 2024).

Di Maladewa, Tiongkok memanfaatkan ketidakhadiran aktif AS dengan memperkuat kerja sama pembangunan infrastruktur dan pariwisata. Ketegangan baru dalam perang dagang Trump 2.0 membuat Tiongkok mencari mitra-mitra kecil untuk memperluas pasar dan investasi alternatif di kawasan Samudera Hindia. Dengan posisi geografis strategis dan potensi ekonomi biru yang besar, Maladewa menjadi target Tiongkok dalam menghadapi pembatasan akses pasar global yang dipicu oleh kebijakan proteksionis Washington.

Perang dagang juga berdampak pada pergeseran aliran perdagangan global. Tiongkok mulai mengalihkan ekspor dan impor strategis melalui rute-rute BRI, termasuk yang melintasi Asia Selatan. Dengan meningkatnya tarif ekspor ke AS, Tiongkok berupaya menciptakan pasar baru dan rantai distribusi alternatif melalui negara-negara seperti Pakistan dan Bangladesh. Dalam kerangka ini, kerja sama bilateral dengan negara-negara Muslim Asia Selatan bukan hanya soal ekonomi, tetapi bagian dari strategi besar Tiongkok untuk menghadapi tekanan eksternal.

Kebijakan AS yang semakin restriktif terhadap teknologi dan keamanan nasional juga berdampak terhadap kerja sama teknologi tinggi Tiongkok dengan negara-negara mitranya. Dalam konteks Asia Selatan, Tiongkok mempercepat investasi di bidang telekomunikasi, energi nuklir sipil, dan kecerdasan buatan dengan Pakistan dan Bangladesh sebagai lokasi prioritas. Ketika AS memblokir Huawei dan perusahaan teknologi Tiongkok lainnya, negara-negara Asia Selatan menjadi laboratorium alternatif bagi pengembangan ekosistem teknologi Tiongkok. Namun, dinamika ini tidak lepas dari risiko. Ketika negara-negara Asia Selatan semakin tergantung pada ekonomi Tiongkok, muncul kekhawatiran akan jebakan utang dan ketidakseimbangan diplomatik. AS melalui strategi Indo-Pasifik mencoba menawarkan alternatif, tetapi kurang konkret dan lebih menekankan pada isu keamanan, bukan pembangunan ekonomi langsung. Dalam konteks ini, negara-negara Muslim Asia Selatan menjadi medan kontestasi baru di tengah rivalitas global yang semakin kompleks.

Selain aspek ekonomi dan strategis, rivalitas AS-Tiongkok juga berdampak pada narasi kultural dan ideologis. Tiongkok menguatkan diplomasi budaya dan simbolisme keagamaan, termasuk menjalin kerja sama dengan institusi-institusi Islam di negara-negara mitranya untuk meredam kritik atas isu Uighur. Sementara itu, pendekatan

normatif AS – yang lebih keras terhadap isu HAM – tidak selalu efektif karena dianggap mengintervensi urusan domestik (Chen, & Chen, 2025). Hal ini menciptakan ruang bagi Tiongkok untuk mengembangkan *soft power* alternatif yang lebih diterima di dunia Muslim Asia Selatan.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa perang dagang AS-Tiongkok bukan hanya soal tarif dan pasar, tetapi juga mempengaruhi arah aliansi, strategi pembangunan, dan dinamika ideologi di berbagai kawasan. Negara-negara Muslim Asia Selatan menjadi bagian dari dinamika global ini, baik sebagai objek maupun subjek strategi kekuatan besar. Bagaimana menavigasi antara kekuatan AS dan Tiongkok akan sangat menentukan arah masa depan kawasan Asia Selatan dalam dekade-dekade mendatang.

Penutup

Hubungan bilateral antara Tiongkok dan negara-negara Muslim di Asia Selatan—khususnya Pakistan, Bangladesh, dan Maladewa—memperlihatkan pola interaksi yang bertumpu pada kepentingan strategis, ketergantungan ekonomi, serta pertimbangan budaya dan keagamaan. Melalui BRI, Tiongkok berupaya memperkuat pengaruh geoekonominya di kawasan ini. Sementara itu, pendekatan diplomasi budaya yang mencakup simbolisme keagamaan dan pertukaran sosial menjadi bagian penting dari strategi *soft power* Beijing. Temuan utama dalam bab ini menunjukkan bahwa kerja sama yang terjadi bukan hanya bersifat transaksional, tetapi juga sarat dengan dimensi simbolik dan politis yang kompleks.

Meski kerja sama tersebut memberikan peluang pembangunan dan integrasi ekonomi, reaksi sosial-politik di negara-negara mitra menunjukkan adanya ambivalensi. Isu Uighur, kekhawatiran akan dominasi Tiongkok, serta resistensi domestik menjadi tantangan

nyata bagi kelangsungan hubungan yang stabil. Dalam konteks ini, upaya Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya melalui *soft power* menghadapi keterbatasan ketika berhadapan dengan identitas keagamaan, tekanan geopolitik dari aktor lain seperti India dan negara-negara Barat, serta dinamika politik dalam negeri masing-masing negara Muslim di Asia Selatan. Dengan kata lain, kemitraan ini bersifat strategis tetapi juga rentan. Rivalitas yang terus meningkat antara AS dan Tiongkok – terutama dengan munculnya fenomena Perang Dagang Trump 2.0 – juga telah menambah tekanan geopolitik di kawasan. Negara-negara Muslim di kawasan Asia Selatan telah berada dalam dilema strategis: di satu sisi, berupaya mempererat hubungan ekonomi dengan Tiongkok; di sisi lain, menghadapi tekanan dari AS dan sekutunya di Barat yang berusaha mengembalikan pengaruhnya melalui pendekatan alternatif dalam pembangunan, perdagangan, dan isu HAM.

Masa depan hubungan Tiongkok dengan negara-negara Muslim Asia Selatan akan sangat bergantung pada kemampuan semua pihak untuk menavigasi perubahan dinamika internasional yang ditandai oleh ketegangan geopolitik, pergeseran aliansi global, dan kebangkitan identitas lokal. Tiongkok dituntut untuk mengembangkan bentuk kerja sama yang lebih partisipatif dan sensitif terhadap norma-norma lokal dan isu hak asasi manusia. Sementara itu, negara-negara mitra perlu secara kritis menilai manfaat dan risiko dari keterlibatan dengan Tiongkok dalam jangka panjang. Refleksi ini menegaskan bahwa dalam era multipolar saat ini, diplomasi tidak hanya menjadi alat negara, tetapi juga medan kontestasi nilai dan kepentingan yang memerlukan kehati-hatian dan adaptabilitas tinggi.***

Daftar Pustaka

- Ahamed, A., Hossain, N., & Rahaman, M. A. (2021). China's vision of regional connectivity, economic corridor and development cooperation in South Asia: Implications for Bangladesh. *Muallim Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(2), 57–70. <https://doi.org/10.33306/mjssh/121>
- Callahan, W. A. (2016). *China Dreams: China's New Leadership and Future Impacts*. Oxford University Press.
- Chaziza, M. (2021). The belt and road initiative: new driving force for Sino-Yemen Relationship. *China Report*, 57(2), 229-246.
- Chen, D., & Chen, Y. (2025, April 30). *Why China is confident it can wait out Trump's trade war*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2025/04/why-china-is-confident-it-can-wait-out-trumps-trade-war/>
- d'Hooghe, I. (2015). *China's Public Diplomacy*. Brill.
- Hillman, J. E. (2018, September 14). *China's Belt and Roller Coaster*. Center for Strategic and International Studies. <https://www.csis.org/analysis/chinas-belt-and-roller-coaster>
- Hurley, J., Morris, S., & Portelance, G. (2018). *Examining the Debt Implications of the Belt and Road Initiative from a Policy Perspective*. Center for Global Development. <https://www.cgdev.org/publication/examining-debt-implications-belt-and-road-initiative-a-policy-perspective>
- Jasmin, N., Sakib, N. H., & Shishir, M. F. J. (2023). Chinese soft power in Bangladesh: Debt trap or shared interests? *The Journal of Indian and Asian Studies*, 4(1), 2350004. <https://doi.org/10.1142/S2717541323500043> World Scientific+8

- Jones, L., & Hameiri, S. (2020). *Debunking the Myth of 'Debt-Trap Diplomacy': How Recipient Countries Shape China's Belt and Road Initiative*. Chatham House. <https://www.chathamhouse.org/2020/08/debunking-myth-debt-trap-diplomacy>
- Kelemen, B., & Turcsányi, R. Q. (2019). It's the politics, stupid: China's relations with Muslim countries on the background of Xinjiang crackdown. *Asian Ethnicity*, 21(2), 223–243. <https://doi.org/10.1080/14631369.2019.1677145>
- Kurlantzick, J. (2015). *Charm Offensive: How China's Soft Power is Transforming the World*. Yale University Press.
- Kutty, S. N. (2019). India–China rivalry and the strategic importance of the Maldives, Mauritius, and Seychelles. In R. M. Basrur, T. C. Mukherjee, & C. Paul (Eds.), *India–China maritime competition: The security dilemma at sea* (pp. 85–99). Routledge.
- Miao, Y. (2020). Sinicisation vs. Arabisation: Online narratives of Islamophobia in China. *Journal of Contemporary China*, 29(125), 748–762. <https://doi.org/10.1080/10670564.2019.1704995>
- Nye, J. S. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. PublicAffairs.
- Pant, H. V., & Passi, R. (2017). India's Tanggapane to China's Belt and Road Initiative: A Policy in Motion. *Asia Policy*, 24, 88–95. <https://doi.org/10.1353/asp.2017.0042>
- Qadri, W. (2024, Juni 20). *Trump's second term: What it means for Asia's supply chains*. The Think Tank Journal. <https://thinktank.pk/2024/06/20/trumps-second-term-what-it-means-for-asias-supply-chains/>

- Rolland, N. (2017). *China's Eurasian Century? Political and Strategic Implications of the Belt and Road Initiative*. National Bureau of Asian Research.
- Shah, R., Hussain, S., & Rasheed, A. (2020). China Pakistan Economic Corridor: Security challenges and sequence of processes of domestic resistance. *European Academic Research*, 7(10), 4819–4839.
- Sharma, A. (2019). The Rise of Confucius Institutes in South Asia: China's Soft Power in India's Backyard. *Asian Survey*, 59(5), 859–884.
- Shi, X., & Kakar, A. (2024). China's image building initiatives in the Muslim world: Assessing the role of public diplomacy in the context of BRI. *Pakistan Journal of International Affairs*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.52337/pjia.v7i1.1010>
- Singh, K. (2024, November 22). *What does Trump 2.0 mean for global trade?* The Wire. <https://thewire.in/world/what-does-trump-2-0-mean-for-global-trade>
- Small, A. (2015). *The China-Pakistan Axis: Asia's New Geopolitics*. Oxford University Press.
- Sultana, G. (2024). A retrospective view on growing proximity between Maldives and China and India's concerns. *Strategic Analysis*, 48(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/09700161.2024.2434416>
- Swaine, M. D. (2015). *Chinese Views and Commentary on the "One Belt, One Road" Initiative*. China Leadership Monitor, 47.
- Wolf, S. O. (2019). *The China-Pakistan Economic Corridor of the Belt and Road Initiative: Concept, Context and Assessment*. Springer.

Zhang, J. (2023). China's religious diplomacy for its Belt and Road Initiative: A review and assessment. *The Review of Faith & International Affairs*, 21(2), 83–94. <https://doi.org/10.1080/15570274.2023.2200284>